



Article Informations
Corresponding Email:
Ismisriseptiani258@gmail.com

Received: 14/05/2026; Accepted:
03/05/2026; Published: 30/06/2026

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGGULANGI CYBERSCAM HUMAN TRAFFICKING DI KAMBOJA PERIODE 2020-2024

Ismi Sri Septiani

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam menanggulangi cyberscam human trafficking di Kamboja selama periode 2020-2024. Fenomena cyberscam telah berkembang menjadi ancaman serius bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, terutama di Kamboja, yang menjadi episentrum praktik penipuan pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan resmi, artikel ilmiah, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan, seperti pembentukan kerangka hukum dan diplomasi bilateral, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, termasuk lemahnya regulasi siber di Kamboja dan keterbatasan sumber daya. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan literasi digital bagi calon pekerja migran, dan sinergi yang lebih baik dalam kerjasama regional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi WNI dari ancaman cyberscam.

Kata Kunci: Kebijakan luar negeri, cyberscam, human trafficking, Indonesia, Kamboja.

Abstract

This study aims to analyze Indonesia's foreign policy in addressing cyberscam human trafficking in Cambodia from 2020 to 2024. The phenomenon of cyberscam has evolved into a serious threat to Indonesian citizens (WNI) abroad, particularly in Cambodia, which has become the epicenter of job fraud practices. The research method employed is qualitative analysis with a descriptive approach, collecting data from various sources, including official reports, academic articles, and interviews with relevant parties. The findings indicate that, although the Indonesian government has taken

significant steps, such as establishing a legal framework and engaging in bilateral diplomacy, the challenges faced remain considerable, including weak cyber regulations in Cambodia and limited resources. The recommendations generated include strengthening law enforcement capacity, enhancing digital literacy for prospective migrant workers, and improving synergy in regional cooperation. This research is expected to contribute to the development of more effective policies to protect WNI from cyberscam threats.

Keywords: Foreign policy, cyberscam, human trafficking, Indonesia, Cambodia.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Era digital yang kita alami saat ini ditandai dengan kemudahan akses informasi dan komunikasi yang luar biasa, memungkinkan individu untuk berinteraksi dan melakukan berbagai aktivitas tanpa terhalang batasan geografis. Jaringan internet yang semakin canggih menjadi tulang punggung utama dari kemajuan ini, memfasilitasi persebaran dan penerimaan informasi secara global dengan kecepatan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, di balik kemudahan dan konektivitas yang ditawarkan, muncul pula tantangan baru yang semakin kompleks, terutama dalam bentuk kejahatan siber atau yang dikenal dengan istilah cybercrime.

Salah satu manifestasi paling mengkhawatirkan dari cybercrime adalah fenomena cyberscam, yang kini marak terjadi di seluruh dunia. Kawasan Asia Tenggara, khususnya, telah dikategorikan sebagai salah satu wilayah yang paling rawan terdampak. Menurut laporan dari International Organization for Migration (IOM), sebanyak 2.438 WNI terjebak dalam sindikat cyberscam dan mengalami eksploitasi ketenagakerjaan di Kamboja antara tahun 2020 hingga Mei 2023.¹ Kamboja telah menjadi episentrum utama bagi praktik cyberscam human trafficking, di mana banyak WNI yang

¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia and UN Migration IOM, "Informasi Kasus Tenaga Kerja Paksa Dan Indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Perusahaan Online Scamming Di Luar Negeri," 2023, 3, <https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/2023-08/infosheet-online-scams-indonesian.pdf>.

terjebak dalam penipuan pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi namun berujung pada eksploitasi dan kerja paksa.²

Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa penggunaan internet di Indonesia meningkat pesat selama pandemi COVID-19, mencapai angka penetrasi sebesar 79,5% pada tahun 2024, yang turut memicu maraknya kejahatan siber (APJII, 2024).³ Peningkatan masif ini, alih-alih hanya membawa dampak positif, justru turut menstimulasi praktik kejahatan siber dalam dimensi yang lebih besar, dan Indonesia tidak terkecuali. Pandemi COVID-19 secara ironis telah membuka ruang bagi modus kejahatan mutakhir, yang mampu menjangkau korban dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tengah mencari pekerjaan.

Tekanan ekonomi dan kebutuhan akan pekerjaan yang mendesak berhasil membuat Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk penipuan berbasis teknologi, yang dikenal sebagai cyberscam. Para scammer, atau individu yang mengoperasikan berbagai jenis penipuan siber, memanfaatkan situasi kerentanan ini untuk melakukan tindakan kriminal. Yang lebih mengkhawatirkan, operasi kejahatan ini kini telah melibatkan aktivitas human trafficking. Oleh karena itu, fenomena cyberscam yang berimplikasi pada human trafficking sangat relevan untuk diklasifikasikan sebagai bagian dari studi hubungan internasional. Kategori kejahatan ini telah berkembang melampaui batas otoritas negara, menghubungkan analisis dari level domestik ke level sistemik, dan secara tepat dapat dikategorikan sebagai jaringan Transnational Organized Crime (TOC).⁴ Hal ini terlihat dari perkembangan skala operasi kejahatan yang telah

² The Star, "Cambodia: UNODC's Map Alleges That Cambodia Is a Global Hub for Scamming Operations with Alleged Companies Linked to High Ranking Officials," Business & Human Rights Resource Centre, June 18, 2025, <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/cambodia-unodcs-map-alleges-that-cambodia-is-a-global-hub-for-scamming-operations-with-alleged-companies-linked-to-high-ranking-officials/>.

³ Wilhelmina Alexandra Valmay Putri Aberth, "Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informasi Dongkrak Jumlah Pengguna Internet Indonesia," GoodStats, 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/pembangunan-infrastruktur-telekomunikasi-dan-informasi-dongkrak-jumlah-pengguna-internet-indonesia-ay1Ju>.

⁴ INTERPOL, "INTERPOL Issues Global Warning on Human Trafficking Fueled Fraud," INTERPOL, 2023, <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2023/INTERPOL-issues-global-warning-on-human-trafficking-fueled-fraud>.

melampaui batas-batas otoritas negara oleh sindikat pelaku, serta bagaimana kasus ini telah beralih menjadi bentuk kejahatan terorganisir di kawasan.⁵

Menurut laporan INTERPOL, kejahatan transnasional ini pertama kali muncul sepanjang tahun 2021. Mekanisme implementasi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal tersebut didominasi oleh pemasangan iklan terkait peluang pekerjaan palsu dengan gaji fantastis di media sosial dan situs perekrutan. Tren kejahatan cyberscam telah dijadikan modus utama oleh kelompok kriminal untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, tanpa sedikit pun menguntungkan pihak korban. Bahkan, penderitaan yang dialami korban seringkali berujung pada eksploitasi yang terus-menerus, berimplikasi pada perdagangan manusia. INTERPOL menegaskan bahwa kejahatan ini bukan hanya kejahatan regional, melainkan ancaman global dengan Asia Tenggara sebagai pusat utama (primary hub) operasi kejahatan dimensi baru dunia.⁶

Data dari IOM menunjukkan kolaborasi dengan pemerintah Indonesia sepanjang tahun 2020 hingga Mei 2023, di mana sebanyak 2.438 WNI telah terjebak dalam sindikat cyberscam dan mengalami eksploitasi ketenagakerjaan.⁷ Dari jumlah tersebut, Kamboja tampak menonjol sebagai negara tujuan yang memiliki potensi paling besar dalam menarik korban WNI, jika dibandingkan dengan negara lain seperti Laos, Myanmar, atau Thailand. Jumlah kasus yang terdeteksi menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, sejalan dengan pola rekrutmen yang lebih gencar dan terstruktur dari jaringan sindikat yang beroperasi di wilayah tersebut. Lemahnya pengawasan di titik-titik keberangkatan dan minimnya koordinasi lintas negara semakin membuka celah bagi para pelaku untuk menjalankan aksinya. Kamboja kerap dimanfaatkan sebagai "pintu masuk" bagi praktik eksploitasi tenaga kerja melalui penipuan lowongan pekerjaan, terutama di

⁵ Ibid.

⁶ INTERPOL, "INTERPOL Issues Global Warning on Human Trafficking Fueled Fraud."

⁷ Republik Indonesia and IOM, "Informasi Kasus Tenaga Kerja Paksa Dan Indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Perusahaan Online Scamming Di Luar Negeri."

sektor layanan digital palsu atau skema investasi bodong. Saat ini, Kamboja telah menjadi pusat aktivitas penipuan terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Realitas tersebut menjadi pendorong utama mengapa banyak WNI berhasil terperangkap dalam modus pekerjaan di industri ilegal ini. Mekanisme penipuan ini seringkali melibatkan teknik manipulasi psikologis dan penggunaan platform digital. Perlakuan tidak selayaknya, berbagai bentuk eksploitasi seperti kerja paksa, kekerasan fisik, pelecehan, dan berbagai tindakan penyalahgunaan lainnya yang dapat menyebabkan kematian korban, menjadi kenyataan pahit.⁸ Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, menuturkan bahwa “Modus cyberscam berawal dari iklan lowongan kerja ke luar negeri yang disampaikan melalui berbagai media sosial. Biasanya yang akan ditawarkan itu adalah sebagai customer service atau marketing dengan gaji US\$1.000 sampai 1.200, sekitar Rp18 juta”.⁹ Disinformasi yang ditemukan di media sosial mengenai lowongan pekerjaan luar negeri di Kamboja menarik korban melalui insentif berupa upah dengan tawaran tinggi. Selain itu, jangkauan sindikat cyberscam kali ini cenderung mampu memanipulasi kalangan berpendidikan tinggi akibat tawaran pekerjaan dengan gaji dan posisi yang menjanjikan.¹⁰

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah besar untuk menangani masalah ini. Sepanjang tahun 2022 dan 2023, Kementerian Luar Negeri Indonesia berupaya maksimal dalam pelayanan, termasuk turut andil dalam operasi penyelamatan, mengidentifikasi potensi korban perdagangan orang, dan memfasilitasi dukungan reintegrasi.¹¹ Jalinan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja dilakukan melalui pertemuan antara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kepolisian Kamboja, dan Menteri Dalam

⁸ Nila Valerisella, Ninne Zahara Silviani, and Ampuan Situmeang, “Kerangka Kerjasama Indonesia Dan Kamboja Dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir (Perdagangan Manusia Dalam Lingkaran Judi Online)” 5, no. 1 (2025): 1–27.

⁹ Amelia Rahima Sari, “Kemlu Catat 3.703 Kasus Online Scam, Paling Banyak Di Kamboja,”

¹⁰ Luki Aulia, “Sindikat Kejahatan Perdagangan Orang Incar Korban Berpendidikan Tinggi,” Kompas.com, 2023, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/09/01/sindikat-kejahatan-perdagangan-orang-incar-korban-berpendidikan-tinggi>.

¹¹ Christophe Archambault, “IOM ’ S Regional Situation Report on Trafficking in Persons Into Forced Criminality in Online Scamming Centres in Southeast Asia,” no. February (2024).

Negeri Kamboja sebagai respons terhadap kasus yang terjadi melibatkan kedua negara tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan dana sebesar 11 miliar rupiah untuk mengoptimalkan operasi-operasi yang akan dilakukan.¹² Namun, setelah berbagai usaha dilakukan Indonesia dalam menghadapi sindikat tersebut, tantangan yang dihadapi masih belum mampu teratasi secara efektif. Lemahnya regulasi siber di Kamboja, minimnya koordinasi lintas lembaga, dan pemahaman WNI terhadap ancaman cyberscam menjadi tantangan yang belum teratasi secara holistik. Hal ini membuka peluang bagi sindikat pelaku penipuan untuk terus melakukan operasi.

Maraknya kasus cyberscam di Kamboja yang menimpa WNI, menampung lebih banyak korban dibandingkan yang berasal dari negara lain, mengindikasikan bahwa Indonesia memerlukan strategi efektif dan terkoordinasi untuk melindungi warga negaranya sendiri dari ancaman cyberscam. Salah satu strategi yang perlu diperhitungkan bagi Indonesia dalam mengatasi dan mencegah kasus lintas negara adalah perlunya kerja sama intensif baik secara bilateral maupun regional untuk memperkuat kerangka dan mekanisme pemberantasan kasus cyberscam lintas negara. Sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), negara memiliki kewajiban hukum untuk melindungi warga negara dari perdagangan orang, termasuk dalam bentuk kerja paksa dan penipuan online.¹³

Untuk itu, penelitian ini patut untuk dikaji karena maraknya praktik penipuan online yang dijalankan oleh sindikat terorganisir menunjukkan bahwa upaya pemberantasan kejahatan siber yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama periode 2020–2024 masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Dalam mengangkat kasus cyberscam human trafficking di kawasan Asia Tenggara, fokus utama yang akan dijadikan objek penelitian

¹² Ibid.

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” BPK RI, 2007, <https://peraturan.bpk.go.id/>.

akan berpusat pada bagaimana Indonesia sebagai countries of origin dalam menghadapi negara tetangga yaitu Kamboja sebagai countries of destination terhadap kasus ini. Selain itu, dilakukannya penelitian ini sebagai bentuk kontribusi akademik dalam mengevaluasi penanggulangan ancaman transnasional di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah khususnya dalam mengangkat kasus cyberscam human trafficking.

2. LANDSKAP CYBERSCAM HUMAN TRAFFICKING INDONESIA-KAMBOJA

2.1 Konvergensi Cyberscam dengan Human Trafficking di Asia Tenggara

Situasi paling mengkhawatirkan dalam perkembangan kejahatan transnasional terkini adalah konvergensi antara praktik cyberscam dan human trafficking di kawasan Asia Tenggara. Fenomena ini pertama kali dilaporkan secara sistematis oleh INTERPOL pada tahun 2021 sebagai bentuk baru dari transnational organized crime, di mana korban perdagangan manusia dipaksa untuk menjadi oknum atau pelaku penipuan daring.¹⁴ Mekanisme operasionalnya melibatkan dua kelompok korban: pertama, mereka yang direkrut melalui penipuan lowongan kerja dan dipaksa bekerja di scam centers; kedua, masyarakat global yang menjadi target penipuan online.

¹⁴ INTERPOL, "CRIME TREND UPDATE : HUMAN TRAFFICKING-FUELED SCAM CENTRES," 2025, <https://www.interpol.int/ar/content/download/23175/file/INTERPOL>.

Gambar 2.1 Dua Tipe Korban Online Scam dan Human Trafficking



Sumber: INTERPOL, 2025

Di Kamboja khususnya, pola ini telah berkembang menjadi industri perbudakan modern berskala besar. Bahkan data dari UNODC menunjukkan bahwa scam centers di Sihanoukville menampung sekitar 100.000 korban, dengan sistem kerja paksa yang mengharuskan mereka bekerja 16-18 jam per hari di bawah ancaman kekerasan fisik dan psikologis.¹⁵ Keterlibatan elite politik lokal dalam industri ini, seperti terungkap dalam investigasi terhadap kasus Hun To, sepupu Perdana Menteri Kamboja, semakin memperparah situasi, di mana sindikat kejahatan terorganisir berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk menjalankan operasi mereka.

2.2 Modus Operandi Jaringan Kejahatan Transnasional

Analisis terhadap mekanisme kejahatan menunjukkan pola yang terstruktur melalui kerangka action-means-purpose. Tahap rekrutmen dimulai dengan iklan lowongan palsu di platform digital, seperti Facebook

¹⁵ UN Human Rights, "Online Scam Operations and Trafficking Into Forced Criminality in Southeast Asia: Recommendations for a Human Rights Response," Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Regional Office for South-East Asia, 2023, 5, <https://bangkok.ohchr.org/news/2022/online-scam-operations-and-trafficking-forced-criminality-southeast-asia>.

dan Telegram, yang menargetkan lulusan perguruan tinggi dengan janji gaji tinggi dan persyaratan minimal.¹⁶

Gambar 2.2 Mekanisme Penyebaran Informasi Rekrutmen Scam



Sumber: Human Trafficking & Forced Labour in Cambodia's Cyberscam Industry, 2024

Mekanisme coercion dilakukan melalui penyitaan dokumen identitas dan penerapan sistem debt bondage,¹⁷ di mana korban dipaksa untuk membayar denda fiktif. Isolasi fisik dan digital di compounds yang dijaga ketat juga menjadi bagian dari strategi kontrol yang diterapkan oleh sindikat.¹⁸ Eksploitasi korban mencakup kerja paksa dalam melakukan penipuan finansial, eksploitasi seksual terhadap perempuan, dan jual-beli korban antar sindikat dengan harga yang bervariasi. Temuan lapangan oleh IOM di 15 provinsi Kamboja mengungkapkan bahwa 83% korban WNI direkrut melalui media sosial, dengan 67% di antaranya berpendidikan diploma atau sarjana. Hal ini menunjukkan evolusi modus dari pekerja migran tradisional ke kalangan terdidik, yang semakin memperumit upaya penanggulangan.

¹⁶ Danielle Keeton-Olsen and Lam Nguyen, "How Cambodia's Scam Mills Reel in New 'Cyber Slave' Workers" (Csmbodya, 2022), <https://restofworld.org/2022/cambodias-scam-mills/>.

¹⁷ Administration for Children and Families (ACF), "Labour Trafficking," The National Human Trafficking Hotline, 2025, <https://humantraffickinghotline.org/en/human-trafficking/labor-trafficking>.

¹⁸ United States Department of State, "The Role of Recruitment Fees and Abusive and Fraudulent Recruitment Practices of Recruitment Agencies in Trafficking in Persons," Vienna, 2015, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Recruitment_Fees_Report-Final-22_June_2015_AG_Final.pdf.

2.3 Respons Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan multilevel untuk menangani cyberscam human trafficking melalui diplomasi bilateral, instrumen hukum, dan mekanisme koordinasi. Di level diplomasi bilateral, pembentukan Komite Bersama Indonesia-Kamboja pada tahun 2023 dan Nota Kesepahaman Perlindungan Pekerja Migran menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama.¹⁹ Selain itu, operasi gabungan penyelamatan korban juga dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Dalam hal instrumen hukum, Indonesia mengacu pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Permenkumham No. 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan WNI. Ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking juga menjadi bagian dari upaya hukum yang lebih luas. Mekanisme koordinasi yang melibatkan Satgas TPPO Polri dan Pusat Krisis Kemenlu menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah ini secara terintegrasi.

2.4 Analisis Efektivitas Kebijakan

Evaluasi implementasi kebijakan menunjukkan keberhasilan dalam beberapa aspek, seperti repatriasi lebih dari 4.700 WNI antara tahun 2020 hingga 2024 dan pencegahan keberangkatan sekitar 3.200 calon korban melalui pengawasan imigrasi. Deklarasi ASEAN di Labuan Bajo pada tahun 2023 juga menjadi salah satu pencapaian penting dalam upaya kolektif untuk menangani perdagangan manusia. Namun, tantangan tetap ada, seperti lemahnya regulasi siber di Kamboja, keterbatasan personel diplomatik, dan fenomena *repeater offenders* yang mencapai 25% dari total kasus. Data KBRI Phnom Penh menunjukkan peningkatan 42% kasus cyberscam di tengah optimasi kebijakan, mengindikasikan kebutuhan pendekatan yang lebih komprehensif.

¹⁹ Martha Herlinawati Simanjuntak, "Dubes RI Dan Menteri Kamboja Bahas Penanggulangan Penipuan Daring," 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4982469/dubes-ri-dan-menteri-kamboja-bahas-penanggulangan-penipuan-daring>.

2.5 Perspektif Teoritis

Kerangka konstruktivisme yang dikemukakan oleh Alexander Wendt menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks ini sebagai manifestasi dari konstruksi identitas nasional dan norma-norma yang terinternalisasi dalam sistem nilai Pancasila.²⁰ Dalam pandangan ini, respons Indonesia terhadap krisis kemanusiaan di Kamboja tidak hanya didorong oleh pertimbangan material, tetapi juga oleh ide-ide dan nilai-nilai yang telah terkonstruksi secara sosial dalam identitas nasional. Keterlibatan Indonesia dalam penanggulangan cyberscam human trafficking mencerminkan komitmen negara untuk melindungi warganya dan berkontribusi dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan manusiawi.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam menanggulangi cyberscam human trafficking di Kamboja periode 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa fenomena cyberscam telah berkembang menjadi ancaman serius yang mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Kamboja, sebagai episentrum utama, telah menjadi lokasi di mana banyak WNI terjebak dalam praktik penipuan pekerjaan yang berujung pada eksploitasi dan kerja paksa. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan, seperti pembentukan kerangka hukum yang jelas, diplomasi bilateral, dan upaya repatriasi, tantangan yang dihadapi masih cukup besar.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa modus operandi sindikat cyberscam semakin kompleks dan terorganisir. Banyak WNI yang menjadi korban direkrut melalui iklan lowongan kerja palsu di media sosial, yang menjanjikan gaji tinggi dan posisi menarik. Namun, kenyataannya, mereka justru terjebak dalam sistem kerja paksa di scam

²⁰ Nabilla Syahaya Putri Aryani, "Constructive Engagement as Indonesia 's Foreign Policy Strategy in Promoting Democratization in Myanmar," *Indonesian Journal of International Relations* 3, no. 2 (2019): 1–14, <https://journal.aihii.or.id/index.php/ijir/article/view/84>.

centres yang dikelola oleh jaringan kejahatan terorganisir. Data dari IOM menunjukkan bahwa sekitar 83% korban WNI direkrut melalui platform digital, dengan mayoritas di antaranya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sindikat kejahatan ini tidak hanya menargetkan individu dengan latar belakang ekonomi lemah, tetapi juga kalangan terdidik yang mencari peluang kerja yang lebih baik.

Dalam konteks kebijakan luar negeri, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai inisiatif. Pembentukan Komite Bersama Indonesia-Kamboja dan Nota Kesepahaman Perlindungan Pekerja Migran merupakan langkah strategis dalam memperkuat kerja sama bilateral. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi yang lebih ketat, seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memberikan landasan hukum untuk melindungi WNI dari praktik *human trafficking*. Namun, meskipun langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah, efektivitas implementasinya masih perlu ditingkatkan.

Tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan cyberscam human trafficking di Kamboja sangat kompleks. Lemahnya regulasi siber di Kamboja, keterbatasan sumber daya manusia di kedutaan, dan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan yang signifikan. Selain itu, fenomena repeater offenders, di mana individu yang pernah menjadi korban kembali terjebak dalam jaringan kejahatan, menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang ada belum sepenuhnya efektif. Data KBRI Phnom Penh menunjukkan peningkatan 42% kasus cyberscam di tengah upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kebijakan, yang mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup beberapa langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia. Pertama, penguatan capacity building bagi aparat penegak hukum dan diplomat di Kamboja sangat penting untuk meningkatkan respons terhadap kasus-kasus yang muncul. Kedua, literasi digital pra-penempatan bagi tenaga kerja

Indonesia perlu ditingkatkan untuk mengurangi kerentanan terhadap penipuan. Ketiga, sinergi ASEAN dalam penegakan hukum siber harus diperkuat untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih efektif dalam menangani kejahatan lintas negara. Keempat, sistem pemantauan korban yang terintegrasi perlu dibangun untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi WNI yang terjebak dalam sindikat kejahatan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam menangani cyberscam human trafficking di Kamboja. Upaya perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban cyberscam dapat lebih efektif dan berkelanjutan jika didukung oleh kebijakan yang komprehensif, kolaborasi antar lembaga, serta kesadaran masyarakat yang tinggi. Melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat lebih baik dalam melindungi warganya dan berkontribusi pada upaya global dalam memberantas kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan cyberscam human trafficking di masa depan.

REFERENSI

- (ACF), Administration for Children and Families. "Labour Trafficking." The National Human Trafficking Hotline, 2025.
<https://humantraffickinghotline.org/en/human-trafficking/labor-trafficking>.
- Aberth, Wilhelmina Alexandra Valmay Putri. "Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informasi Dongkrak Jumlah Pengguna Internet Indonesia."

GoodStats, 2024. <https://data.goodstats.id/statistic/pembangunan-infrastruktur-telekomunikasi-dan-informasi-dongkrak-jumlah-pengguna-internet-indonesia-aylJu>.

Amelia Rahima Sari. "Kemlu Catat 3.703 Kasus Online Scam, Paling Banyak Di Kamboja," n.d.

Archambault, Credit Christophe. "Iom ' S Regional Situation Report on Trafficking in Persons Into Forced Criminality in Online Scamming Centres in Southeast Asia," no. February (2024).

Aryani, Nabilla Syahaya Putri. "Constructive Engagement as Indonesia ' s Foreign Policy Strategy in Promoting Democratization in Myanmar." *Indonesian Journal of International Relations* 3, no. 2 (2019): 1–14. <https://journal.aihii.or.id/index.php/ijir/article/view/84>.

Aulia, Luki. "Sindikatan Kejahatan Perdagangan Orang Incar Korban BerpendidikanTinggi." *Kompas.com*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/09/01/sindikatan-kejahatan-perdagangan-orang-incar-korban-berpendidikan-tinggi>.

INTERPOL. "CRIME TREND UPDATE : HUMAN TRAFFICKING-FUELED SCAM CENTRES," 2025. <https://www.interpol.int/ar/content/download/23175/file/INTERPOL>.

———. "INTERPOL Issues Global Warning on Human Trafficking Fueled Fraud." INTERPOL, 2023. <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2023/INTERPOL-issues-global-warning-on-human-trafficking-fueled-fraud>.

Keeton-Olsen, Danielle, and Lam Nguyen. "How Cambodia's Scam Mills Reel in New 'Cyber Slave' Workers." *Csmbodya*, 2022. <https://restofworld.org/2022/cambodias-scam-mills/>.

Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” BPK RI, 2007. <https://peraturan.bpk.go.id/>.

Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, and UN Migration IOM. “Informasi Kasus Tenaga Kerja Paksa Dan Indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Perusahaan Online Scamming Di Luar Negeri,” 2023, 3.

<https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/2023-08/infosheet-online-scams-indonesian.pdf>.

Simanjuntak, Martha Herlinawati. “Dubes RI Dan Menteri Kamboja Bahas Penanggulangan Penipuan Daring,” 2025.

<https://www.antaranews.com/berita/4982469/dubes-ri-dan-menteri-kamboja-bahas-penanggulangan-penipuan-daring>.

The Star. “Cambodia: UNODC’s Map Alleges That Cambodia Is a Global Hub for Scamming Operations with Alleged Companies Linked to High Ranking Officials.” Business & Human Rights Resource Centre, June 18, 2025. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/cambodia-unodcs-map-alleges-that-cambodia-is-a-global-hub-for-scamming-operations-with-alleged-companies-linked-to-high-ranking-officials/>.

UN Human Rights. “Online Scam Operations and Trafficking Into Forced Criminality in Southeast Asia: Recommendations for a Human Rights Response.” Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Regional Office for South-East Asia, 2023, 5. <https://bangkok.ohchr.org/news/2022/online-scam-operations-and-trafficking-forced-criminality-southeast-asia>.

United States Department of State. “The Role of Recruitment Fees and Abusive and Fraudulent Recruitment Practices of Recruitment Agencies in Trafficking in Persons.” Vienna, 2015. <https://www.unodc.org/documents/human->

trafficking/2015/Recruitment_Fees_Report-Final-
22_June_2015_AG_Final.pdf.

Valerisella, Nila, Ninne Zahara Silviani, and Ampuan Situmeang. "Kerangka Kerjasama Indonesia Dan Komboja Dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir (Perdagangan Manusia Dalam Lingkaran Judi Online)" 5, no. 1 (2025): 1–27.